

## KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Oleh :

Anesti Rohma Wardani<sup>1)</sup>, Farid Setiawan<sup>2)</sup>, Moh Rifki<sup>3)</sup>, Nazhif Nafi' Dinulloh<sup>4)</sup>, Indo Ahya Maulana<sup>5)</sup>,  
Nur'Aini Zahro<sup>6)</sup>, Hafizh Ananda Rizkilla<sup>7)</sup>, Nurul Khiyaroh<sup>8)</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8</sup>Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan

<sup>1</sup>email: anesti1900031082@webmail.uad.ac.id

<sup>2</sup>email: farid.setiawan@pai.uad.ac.id

<sup>3</sup>email: moh1900031087@webmail.uad.ac.id

<sup>4</sup>email: nazhif1900031089@webmail.uad.ac.id

<sup>5</sup>email: indo1900031092@webmail.uad.ac.id

<sup>6</sup>email: nuraini1900031343@webmail.uad.ac.id

<sup>7</sup>email: hafizh2000031203@webmail.uad.ac.id

<sup>8</sup>email: nurul2000031203@webmail.uad.ac.id

### Abstrak

Pendidikan merupakan suatu bidang yang begitu sangat penting didalam kehidupan manusia. Dimana Pendidikan sangat mendorong dan dapat meningkatkan sebuah kualitas yang terdapat pada manusia baik dalam segi kompetensi, efektif dan juga psikometer. Dalam analisis kebijakan merupakan sebuah penelitian sosial yang dimana dilakukan secara sistematis dan disusun dalam rangka untuk mengetahui sebuah substansi dari suatu kebijakan yang dapat diketahui dengan jelas. Kebijakan menurut istilah dapat diterjemahkan dengan politik program, keputusan aturan, konverensi, ketentuan, rencana strategis, serta pemahaman yang lainnya. Kebijakan merupakan suatu kegiatan politik didalam organisasi yang dapat memberikan dan menciptakan pemikiran dengan bijaksana sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi tersebut sehingga pemikiran analisis kebijakan pendidikan adalah suatu konsep prosedur dalam menghasilkan informasi data-data di pendidikan sebagai suatu pengarahan sebagai alat alternative untuk perumusan kebijakan dalam mengambil keputusan yang bersifat diplomatis dalam mengatasi masalah pendidikan. Dengan demikian analisis pendidikan ialah ilmu sosial terapan yang dikonsepsi dalam rancangan kerangka substansi kebijakan pendidikan yang bertujuan sebagai penjelas pada masalah yang akan dijawab oleh kebijakan dan suatu masalah yang akan timbul akibat implementasi kebijakan yang telah dibuat.

**Kata Kunci:** *Analisi, Kebijakan, Pendidikan*

### 1. PENDAHULUAN

Setiap orang mempunyai keinginan untuk mewariskan suatu aturan-aturan kepada generasi selanjutnya. Menurut (Imron, 2012) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ciri khas dari seorang pemimpin dalam melakukan kegiatan.

Pendidikan adalah bidang yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pendidikan dapat mendorong meningkatkan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Masalah yang dihadapi dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas kehidupan sangat kompleks, banyak faktor yang harus dipertimbangkan karena pengaruhnya pada kehidupan manusia tidak dapat diabaikan, yang jelas disadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa (Timperly, 2012).

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan

faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

Sebagaimana diungkapkan oleh (Fattah, 2012) bahwa analisis kebijakan pendidikan menggambarkan bagaimana negara merencanakan dan menuju pada prioritas pendidikan, kemudian hasil analisis tersebut harus dijelaskan oleh adanya faktor-faktor global kebijakannya. (Dunn, 2016) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Stokey & Zekhauser (1978), mengartikan bahwa analisis kebijakan adalah sebagai suatu proses yang rasional dengan menggunakan metode dan teknik yang juga rasional.

Seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya peningkatan mutu pendidikan. Setiap sistem pendidikan harus mampu melakukan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dan peningkatan mutu (Goodwin, 2014). Aktivitas yang para analis lakukan dengan memakai salah satu cara maupun

kombinasi cara agar mendapatkan pertimbangan untuk dijadikan tumpuan saat membangun planning apa yang akan itu bermanfaat serta sinkron mulai dari Visi Misinya dan apa yang direncanakan dalam Pendidikan dibatas waktu yang ditentukan. Sehingga dalam analisis kebijakan ini memiliki beberapa point penting, apa saja? pertama, kegiatan; kedua, analisis; ketiga, salah satu maupun beberapa kombinasi metode; keempat, saran untuk planning yang akan dilakukan. Maka dari itu bisa menghasilkan informasi teknis dari analisis kebijakan Pendidikan itu untuk sebuah masukan bagi formulasi dari sebagian opsi kebijakan yang mendapat dukungan dari keterangan teknis pula, adalah dari bagian bidang Pendidikan, keterangan dari teknis itu adalah sebuah satuan tunggal maklumat akan realitasinduktif, yang disupport melalui realita empiris, sebagai wujudan melalui deretan analisis data. Maka kebijakan analisis Pendidikan memberi pemahaman yang lebih yaitu aktivitas untuk memperoleh fakta kependidikan melalui jalan yang memakai data untuk masukan, agar perumusan dari alternative kebijakan dapat dilakuikan dan ketentuannya itu berwatak politis yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam kependidikan. Sehingga menjalankan analis tidak sembarangan dilakukan oleh analisis kebijakan pendidika pada data maupun hanya informasi. Namun juga teliti dalam mencermati semua aspek yang berkaitan dalam prosedur membuat sebuah kebijakan., sampai kepada penyampaian alternatif tersebut terhadap para pembuat keputusan.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan kajian analisis dari berbagai sumber buku, internet, artikel, dan jurnal. Hal ini digunakan untuk analisis tanpa mencari data dengan terjun ke lapangan. Di jurnal ini membahas tentang analisis kebijakan pendidikan. Menurut Muhson (2006:1) menyatakan bahwa analisis data adalah sebuah metode dalam suatu proses penelitian yang dilaksanakan setelah semua data yang diperoleh akan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Setelah ini akan dibahas menggunakan metode deskriptif yang di mana pengertiannya Menurut Sugiyono (2011:147), metode analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menggolongkan data yang telah dikumpulkan sesuai apa adanya tanpa bermaksud membuat suatu kesimpulan baru yang bersifat umum atau mengeneralisasikannya.

Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data sekunder, Menurut Sugiyono dalam Ahdiani (2013) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah terjadi. Ada berbagai jenis bentuk dokumen seperti: (1) gambar; (2) catatan; (3) karya yang semuanya dibuat maupun didokumentasikan oleh seseorang. Studi dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data

dengan meneliti untuk mendapatkan data untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan studi dokumentasi data yang dicari di internet. Menurut Moleong dalam Budiman (2015:68) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah salah satu metode dalam suatu penelitian pengumpulan data dengan membaca, memahami, dan menganalisis dokumen yang ada dalam penyimpanan yang dibuat oleh seseorang.

Dalam jurnal ini menggunakan teknik analisis data berupa metode SWOT proses dimulai dengan mengidentifikasi, merumuskan suatu kebijakan, suatu rencana, dan suatu proyek skala besar maupun kecil dengan menilai serta memaparkan faktor dalam dan luar yang dapat mempengaruhi jalannya kebijakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Kemudian dipilih faktor mana yang membantu dan mana yang tidak mendukung dalam rencana yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan tersebut. Pedoman dasar di analisis SWOT adalah membandingkan kondisi tertentu dengan kondisi yang lainnya yang sama maupun berbeda. (1) *strenght*: terdapat di dalam kebijakan tersebut berupa kekuatan dan kelebihan; (2) *weakness*: terdapat di dalam kebijakan tersebut berupa kelemahan dan kekurangan; (3) *opportunity*: terdapat di luar kebijakan tersebut berupa peluang; (4) *threats*: terdapat di luar kebijakan tersebut berupa ancaman. Kemudian dilakukan analisis berbagai data yang telah diperoleh setelah selesai menganalisis lalu menetapkan rencana mana yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Kebijakan Pendidikan

#### a. Definisi kebijakan

Kebijakan menurut istilah dapat diartikan sebagai politik, program, keputusan aturan, konverensi, ketentuan, rencana strategis, serta pendapat yang sesuai lainnya. Dalam suatu Kebijakan memiliki istilah-istilah lain dalam gambaran yang berbeda. Kebijakan bisa dapat di istilahkan dengan kecerdasan, keputusan, kemahiran serta kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat menjadi suatu rencana dasar dalam melakukan pekerjaan, juga dapat digunakan dalam kepemimpinan di pemerintahan untuk bertindak dan memberikan keputusan yang telah disepakati, serta dapat digunakan dalam organisasi untuk merancang pernyataan cita-cita yang menjadi tujuan, kebijakan juga dapat menjadi tujuan, prinsip sebagai pedoman dalam mencapai harapan yang sesuai tepat sasaran.

Kebijakan merupakan suatu aktivitas kegiatan politik didalam suatu kelompok organisasi yang dapat memberikan dan menciptakan pemikiran dengan bijaksana sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan disetujui dalam organisasi tersebut untuk memberikan pemikiran menjadi terarah dengan baik, pemikiran tersebut bertujuan memutuskan permasalahan sehingga dapat

mendapatkan keputusan yang sesuai dengan tujuan (Rismawan 2017). dalam aspek kehidupan memang membutuhkan pemikiran bijak, yang senantiasa dapat diteladani dan menjadikan sebuah pedoman dan panduan didalam aktivitas agar dapat membatasi setiap perilaku dan keputusan secara terarah dengan baik. Kebijakan tersebut juga dapat diterapkan didalam sebuah sistem pendidikan yang dapat disebut kebijakan pendidikan.

#### b. Analisis kebijakan pendidikan

Analisis suatu kebijakan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu konsep tata cara dalam menghasilkan informasi yang berbentuk sebuah kumpulan data-data dipendidikan sebagai suatu pengarah sebagai alat alternative untuk perumusan kebijakan dalam mengambil keputusan yang bersifat diplomatis dalam mengatasi masalah pendidikan (Hanisyi 2013). Analisis kebijakan pendidikan bertujuan untuk menganalisis data dan informasi pendidikan serta mempertahankan aspek-aspek didalam proses perancangan dan pembuatan suatu kebijakan. Proses dari pembuatan kebijakan meliputi dari menganalisis masalah, pengumpulan data terkait pendidikan, penentuan alternative hingga pada penyampaian alternative terhadap para pembentuk keputusan dalam pendidikan. Rumusan alternative pendidikan dibuat melalui pelaksanaan analisis kebijakan tidak serta merta muncul sendiri tanpa adanya analisis kebijakan terlebih dahulu. Setelah rumusan kebijakan pendidikan telah didukung oleh kekuatan kewenangan yang sudah ada, dari dukungan otoriter atau kewenangan tersebut maka alternative kebijakan akan dapat berubah menjadi kebijakan pendidikan. Maka dari itu prosedur dapat menciptakan alternative kebijakan, sehingga proses tersebut menjadi rasional. Berlangsungnya proses kebijakan merupakan suatu bagian yang digunakan dalam proses politik oleh para wewenang yang memiliki otoritas atau kekuasaan.

Kebijakan pendidikan mempunyai sifat yang strategis yang terkait dengan politik, meskipun banyak pihak yang menangkap serta memahami pendidikan harus bebas dari politik. Salah satunya tujuan, nilai-nilai, arah, dan dana pendidikan. Jadi pendidikan nasional semuanya diatur dalam kesepakatan politik. Begitupun realitanya, masih banyak ditemui proses rasional analisis kebijakan pendidikan yang melibatkan politik dan tidak dapat dipisahkan. Proses politik menjadi salahsatu bentuk rasioanal karena proses politik masih ada orientasi hubungan dengan kepentingan masyarakat.

Analisis pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu social terapan yang dikonsepsikan dalam sebuah struktur rancangan suatu kerangka substansi kebijakan pendidikan yang bertujuan untuk memperjelas suatu masalah yang akan diselesaikan oleh kebijakan dan mengantisipasi suatu masalah yang akan terjadi akibat implementasi kebijakan yang telah dibuat sebelum ditetapkan. Maka dari itu analisis kebijakan di bidang pendidikan sangatlah

penting di era zaman milenial sekarang, sehingga pihak yang berwenang dan pemerintah yang memiliki otoritas secara langsung dibiarkan dalam pengesahan suatu kebijakan jika dalam pengesahan tersebut melakukan tindakan tertentu yang mempengaruhi dan memberikan dampak negative terhadap masyarakat tanpa menganalisis dan menelaah serta di fahami substansi, alasan, dampak terdahulu bagi masyarakat. Artinya kebijakan harus dikritisi dan dikaji sesuai data informasi guna untuk kesejahteraan masyarakat dan kepentingan pendidikan nasional.

#### Urgensi Analisis Kebijakan Pendidikan

Implementasi analisis kebijakan mesti dilakukan, karena mampu mendukung dalam pengambilan kesimpulan guna memperoleh keterangan terkait atas kesimpulan yang akan diambil. Proses analisis kebijakan bisa dilaksanakan dengan observasi, penjelasan serta pemisahan kasus-kasus yang mampu mengetahui ketidaksesuaian antara tujuan dan usaha menghadirkan cara-cara baru, dan mengajukan cara untuk mengungkapkan gagasan pada pembuatan kebijakan. Keterlibatan utama berdasarkan proses implementasi analisis kebijakan yaitu menyampaikan saran atas keputusan dengan menghitung sensitivitas dan prioritas parameter yang telah ditentukan. Analisis kebijakan bukanlah inti dari proses pengambilan kepentingan, tetapi penting karena hal ini merupakan komponen dari prosedur evaluasi kelembagaan. Badjuri dan Yuwono menyampaikan bahwa terdapat lima poin utama kenapa analisis kebijakan penting: 1) Analisis kebijakan dilaksanakan menggunakan teknik ilmiah yang objektif, logis dan ilmiah. Artinya ketika analisis kebijakan dilakukan, penyusunan kebijakan dilaksanakan dengan cara saintifik oleh karena itu kebijakan tersebut bisa diukur dan dipertanggungjawabkan 2) analisis kebijakan yang dilaksanakan secara terfokus dan menyeluruh akan membentuk kebijakan yang sesuai dengan tujuan, sehingga mampu memajukan kesejahteraan rakyat negara. 3) analisis kebijakan bersifat multidimensional, interdependen, dan berkaitan sehingga penting dilakukan guna membentuk dampak yang komprehensif. 4) analisis kebijakan mampu membentuk arah implementasi kebijakan dan melaksanakan evaluasi. Bukti ini karena analisis kebijakan bisa bersifat konkret dan strategis, oleh karena itu bisa dipakai pada masa mendatang. 5) analisis kebijakan mampu membagikan peluang besar untuk rakyat agar bisa berkontribusi dalam upaya membentuk kebijakan (partisipasi publik). Oleh sebab itu analisis kebijakan publik mampu dijadikan objek yang dipakai untuk mewujudkan impian (Safitri et al., 2021).

Untuk menghindari kebijakan yang diambil dari pertimbangan dengan kekuasaan melaka maka perlunya dilakukan analisis kebijakan. Pertimbangan yang dilaksanakan secara saintifik dengan menggunakan prosedur ilmiah, objektif dan sistematis kadang sulit diketahui. Kondisi ini

disebabkan karena keterkaitan antara pembentukan kebijakan yang menggunakan unsur politik yang berkaitan dengan kebijakan sentral dan daerah. Adanya analisis kebijakan dilaksanakan mampu memberikan fakta dan argumentasi yang utuh sehingga bisa disetujui oleh masyarakat. Hal yang terpenting yang bisa dilakukan pada analisis kebijakan adalah perlunya mengidentifikasi kasus dan tujuan perumusan kebijakan. Tetapi banyak kasus yang terjadi saat pembuat kebijakan mengintruksikan para analisis kebijakan guna melaksanakan analisis tetapi tidak bersama dengan penggunaan keterangan yang asertif, bahkan ada yang memberikan keterangan yang tujuannya berbeda bagi para analisis kebijakan. Walaupun ada maksud yang berbeda mereka mesti didapatkan. Jadi maksud tersebut mampu didapatkan dalam kurun waktu dekat dan maksud tujuan yang didapatkan untuk generasi kedepan. Contoh yang bisa ditemukan yaitu pendidikan. Pendidikan dasar dan pendidikan menengah merupakan tujuan dari pendidikan. Pendidikan tujuannya untuk mengembangkan mutu pengetahuan serta keahlian, mengembangkan kepribadian dan mental masyarakat, dan memperbaiki tatanan sosial kemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa perlunya dilakukan analisis kebijakan yaitu untuk memahami bentuk keselarasan dan pembiayaan berdasarkan kebijakan yang diambil dan dianalisis dengan metode ilmiah menggunakan pendekatan saintifik. Hal ini karena analisis kebijakan di Indonesia belum dilaksanakan secara maksimal.

Kebijakan yang diambil banyak yang bersifat politis dan terburu-buru. Dari uraian yang disajikan, bisa disimpulkan pentingnya analisis kebijakan sebelum mengambil putusan bisa mempengaruhi efektivitas kebijakan. Tetapi, sangat disayangkan kebijakan yang diambil di Indonesia banyak tidak dianalisa secara menyeluruh. Akibatnya banyak kebijakan non-agresif dan pemecahan masalah yang didapatkan. Proses kebijakan tidak bisa disangkal jika mahal karena banyak kebijakan yang tidak dilaksanakan secara optimal.

#### **Fungsi Analisis Kebijakan Pendidikan**

Sebuah kebijakan dalam organisasi pendidikan akan terlaksana dengan baik dengan adanya faktor yang menentukan perubahan, perkembangan, dan restrukturisasi organisasi pendidikan. Hal ini berupa keputusan-keputusan yang terdiri dari tujuan, prinsip, dan aturan. Sehingga sumber daya organisasi pendidikan dapat bergerak dan terlaksana dengan maksimal. Kebijakan pendidikan memiliki pedoman untuk pemimpin, staf, dan personel organisasi pendidikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pedoman ini menggunakan format kebijakan pendidikan yang berbentuk catatan dan tulisan. Analisis kebijakan pendidikan dilakukan sebagai panduan untuk melakukan tindakan dalam memberi arahan kegiatan pendidikan, organisasi sekolah atau lembaga

pendidikan, sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai.

Analisis kebijakan pendidikan yang dilaksanakan sebagai pedoman untuk melakukan tindakan bagi pengambilan keputusan berfungsi sebagai: 1) mencapai ketertiban layanan dalam pendidikan, 2) setiap warga diberi jaminan hak asasi untuk mendapatkan layanan pendidikan, 3) keefektifan program kegiatan layanan pendidikan, 4) pemeran pendidikan dapat melaksanakan pendidikan, 5) terwujudnya ketertiban administrasi (Arwidayanto et al., 2018). Adapun fungsi lain analisis kebijakan pendidikan yaitu ada tiga fungsi, yang mana apabila tiga fungsi tersebut tidak lengkap atau lebih maka target dalam analisis kebijakan tidak dapat tercapai.

- 1) Fungsi Alokasi. Dalam kegiatan analisis kebijakan pendidikan, fungsi alokasi merupakan salah satu fungsi yang penting untuk diperankan. Hal ini berkaitan dengan mengalokasikan agenda penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan pendidikan itu sendiri yang berlandaskan kajian terhadap isi-isu kebijakan pendidikan yang tingkatnya lebih makro dan strategis.
- 2) Fungsi inquiri. Apabila semua atau sebagian agenda penelitian dan pengembangan telah terlaksanakan dan mencapai hasilnya maka fungsi inquiri ini dapat dilaksanakan. Topik penelitian dari fungsi ini adalah komponen integral dari isu kebijakan strategis-politis. Kajian kegiatan analisis kebijakan pendidikan dalam fungsi inquiri ini bersifat komperhensif yang bisa berbentuk kajian metodologi atau kajian substansi.
- 3) Fungsi komunikasi. Fungsi ini dapat dilakukan apabila analisis kebijakan pendidikan sudah menghasilkan berbagai usulan kebijakan yang realistis. Dalam fungsi komunikasi ada pihak-pihak untuk bisa melaksanakan tugas analisis kebijakan yaitu penyampaian alternatif atau gagasan kebijakan. Pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana, pengelola, peneliti, dan masyarakat luas sebagai konsumen pendidikan (Saifuddin, 2016).

#### **Karakteristik Analisis Kebijakan Pendidikan**

Selain itu, dapat kita ketahui bahwasanya diperoleh karakteristik-karakteristik ini dalam analisis kebijakan pendidikan yang perlu kita diketahui artinya, analisis kebijakan pendidikan yang mewujudkan suatu metode, jalan, ataupun aktivitas panduan yang berasal dari beraneka macam sumber berita tentang bantuan dalam pendidikan. Selain itu juga dapat mewujudkan suatu berita yang secara spontan dengan menjadi sumber utama dalam sebuah tinjauan analisis kebijakan dan juga merupakan keluaran. Analisis kebijakan dapat berupa konsultasi teknis standar operasional prosedural (SOP).

Adapun Karakteristik memiliki ciri analisis kebijakan pendidikan berbentuk suatu materi dasar, alur, rangkaian dan sasaran untuk memahami ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan lalu konsumen dari analisis ini merupakan hal yang dapat

diusaikan dalam ketentuan serta anggota dengan memiliki kepentingan tentang politik yang telah ditetapkan. Kajian politik pendidikan ini harus Memiliki konsep operasional dan juga tujuan yang jelas untuk memperjelas skema pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan dan juga harus dibuat oleh pihak yang berwenang (Ghazali & Wibawa, 2021).

Metode masalah pendidikan adalah sistem yang bertujuan menginventaris ciri-ciri dalam primer menurut metode ini bukan setara menggunakan enumerasi menurut sepenggal metode, mengenai ciri menurut metode masalah pendidikan merupakan: tidak terdapat perkara pendidikan yang serupa dengan karakteristik dan juga karakter, karakteristik dan konduite setiap masalah pendidikan mengenai dampak di dalam metode sebagai holistik, dengan dampak di dalam holistik metode jangan terkait dalam anggota individu atau sub metode yang berbeda, semua isu dan masalah pada Analisis Kebijakan Pendidikan 43 sub gerombolan yang bahkan mungkin menurut anggota metode memiliki dampak tidak bebas atas metode ini. Maka dari itu perlu adanya analisis kebijakan pendidikan, kemungkinan terjadinya dampak-dampak yang tidak bisa diperkirakan menurut suatu analisis kebijakan pendidikan mengingat sanggup terjadi pemecahan perkara yang sah akan tetapi, di dalam metode yang salah. Jika metode kebijakan bersifat berbelit-belit, dengan hal itu akan muncul ketidaksamaan. Filsafat dengan hal di itu metode bertentangan atas sikap yang dikerjakannya. Adapun pakar ahli yang menandai ciri- ciri analisis kebijakan pendidikan secara utama, yaitu menjadi berikut:

- 1) Mempunyai maksud pendidikan, sebagai hal ini analisis kebijakan pendidikan wajib meyanggah arah yang sudah pasti terarah, tujuan hal ini pasti sudah menaruh manfaat di dalam penyelesaian metode pendidikan yang mendasar.
- 2) Melengkapi aspek normal, analisis kebijakan pendidikan seharusnya perlu bertindak secara cepat dengan memenuhi agar di dalam kebijakan pendidikan bisa dipertimbangkan dan secara normal dengan bertindak dalam suatu kawasan tertentu. Dengan hal itu, kebijakan pendidikan harus melengkapi kondisi secara undang-undang sesuai jenjang strata konstitusi yang berlaku terhadap sebuah Kawasan sampai beliau bisa dinyatakan normal dan resmi berlaku pada semua kawasan yang ditentukan.
- 3) Menyandang rancangan fungsional, analisis kebijakan pendidikan adalah pelatih berwatak awam, maka dari itu wajib memiliki jumlah faedah bagi orang fungsional dan sanggup untuk diaplikasikan. Dengan hal itu, kebijakan pendidikan artinya sebuah macam kewajiban agar dapat menguraikan desain pendapatana arah pendidikan yang dibutuhkan stakeholder. Denganitu maka terjadinya fungsi dukungan pada

pengambilan keputusan termasuk keperluan yang akan di analisis kebijakan pendidikan.

- 4) Disusun oleh pihak yang berwenang kebijakan pendidikan semestinya mempunyai wewenang buat memaksa pihak terkait, buat menghindari resikonya nir hingga menyebabkan dampak hancurnya pendidikan dan daerahnya. Para pemangku (administrator) pendidikan, ahli politik dan analisis kebijakan yang terkait dengan hal itu memakai kebijakan pendidikan merupakan bagian utama penghasil kebijakan pendidikan.
- 5) Bisa dinilai dengan kualitas, analisis kebijakan pendidikan dasar tanggal menurut ahli pakar didalam syarat yang perlu ditindaklanjuti. Apabila mempunyai niat yang baik dan tulus, maka perlu mempertahankan dan juga ditingkatkan, sebaliknya apabila menyandang kekurangan, dengan hal itu wajib bisa memperbaiki. Analisis kebijakan pendidikan memiliki sifat yang mampu di evaluasi secara alamiah, ampuh, dan praktis.
- 6) Mempunyai sistematika, analisis kebijakan pendidikan sebagai sebuah skema, sang karena itu hendaklah mempunyai sistematika yang menonjol dalam agen dengan melibatkan sepenuhnya di dalam segi yangnantinya perlu dikelola oleh sistemnya. Penataan ini juga dimohon dapat memiliki etika yang positif, efektif dan juga ditetapkan yang atas karena analisis kebijakan pendidikan yang dipisahkan asal karakter diskriminatif, pragmatis, dan bentuk yang terdapat dengan dampak banyak sekali macam faktor yang saling bentrokan dengan yang lainnya.

Dengan hal ini, perlu diamati dengan seksama dan teliti. Supaya pengesahan bukan menyebabkan kekurangan atau cacat pada anggaran baik domestik dan juga eksternal. Sedangkan, menurut analisis kebijakan pendidikan sepatutnya bertumpu dengan menggunakan kebijakan yang lain. Contohnya kebijakan penganggaran, kebijakan politik. Dan juga kebetulan dalam kebijakan pendidikan dalam pusat, wilayah dan forum pendidikan sendiri-sendiri (Pamungkas et al., 2021).

#### 4. KESIMPULAN

Dengan demikian analisis kebijakan pendidikan merupakan sosiologi terapan yang dikonseptualisasikan dalam rencana substansi sistem strategi instruktif yang menunjuk pada klarifikasi masalah yang akan dijawab oleh pendekatan dan masalah yang akan muncul karena pelaksanaannya pengaturan yang telah dibuat.

Kerangka isu persekolahan adalah kerangka kerja yang mengharapakan untuk memperhitungkan kualitas pokok kerangka yang tidak setara dengan jumlah bagian dari sub kerangka, sedangkan atribut kerangka isu pelatihan adalah 1) tidak ada perbedaan. masalah instruktif dalam kualitas dan perilakunya, 2) atribut dan perilaku masing - masing masalah

instruktif akan mempengaruhi kerangka secara keseluruhan, 3) dampaknya semua dalam semua kerangka tidak bergantung juga pada satu bagian atau sub-pengaturan yang lain, 4) semua isu dan isu dalam investigasi strategi persekolahan 43 potensi subkelompok kerangka individu tidak memiliki dampak yang bebas dari keseluruhan kerangka kerja.

Berkenaan dengan para ahli yang berbeda yang mengenali atribut-atribut ujian strategi persekolahan secara eksplisit, khususnya sebagai berikut: memiliki tujuan instruktif, di mana pemeriksaan pengaturan instruktif harus memiliki judul yang jelas, tujuan yang memberikan keuntungan untuk mengurus masalah instruktif penting.

## 5. REFERENSI

- Arwildayanto, Arifin, S., & Warni, S. T. (2018). Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoritis, Eksploratif Dan Aplikatif. In *Kebijakan Publik*. (Vol. 53, Issue 9).
- Dunn, W. (2016). *Public Policy Analysis (fifth)*. New York: Routledge.
- Fattah, N. &. (2012). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rodaskarya.
- Ghazali, Irwan, Zakki Teguh Wibawa, dkk. (2021). *Analisis kebijakan pendidikan*. 05, 67–77.
- Goodwin, A. (2014). *Globalization and the preparation of quality teacher: rethinking knowledge domains for teaching*. *Teaching Education*, 21(1), 19-32. <http://doi.org/10.1080/10476210903466901>.
- Hanisyi, Asmad. 2013. "Konsep Dasar Analisis Kebijakan." *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 4: 48–63.
- Imron. (2012). *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Pamungkas, Oktri, M. Yusuf Noor Khizain dkk. (2021). *KONSEP PEMIKIRAN MENGENAI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN*. 1(1), 6.
- Rismawan, Wawan. 2017. "Peran Dan Fungsi Infrastruktur Politik Dalam Pembentukan Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 4: 511–18.
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.29210/3003818000>
- Saifuddin, A. (2016). Eksistensi Kurikulum Pesantren Dan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 207. <https://doi.org/10.15642/pai.2015.3.1.207-234>
- Timperly, H. W. (2012). *Teacher Profesional Learning and Development: Best Evidence Synthetis Iteration (BES)*. Ministry of Education, 3(1), 130-153. Retrieved from <http://www.oecd.org/edu/school/48727127.pdf>